

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the Apoor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang mewujudkan kesejahteraan penduduk. Salah satu sasaran pembangunan adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di hampir setiap negara di

dunia, terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di sekitarnya. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat *multidimensional*. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, 2008).

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Amerika Serikat, China, dan India. Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan penduduk secara agregat dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika. Berdasarkan data BPS Indonesia, kemiskinan di Indonesia tiap tahun terus mengalami penurunan dari periode tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada periode tahun 2014 sampai 2017 tingkat kemiskinan turun dari angka sebesar 10,96 persen pada tahun 2014 lalu menjadi 10,12 persen pada tahun 2017.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat, hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari data BPS, tingkat kemiskinan mengalami kecenderungan penurunan di Sumatera Barat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan sebesar 6,89 persen dan naik menjadi 7,31 persen pada tahun 2015, kemudian turun menjadi 7,09 persen di tahun 2016 dan 6,87 persen pada tahun 2017.

Keberhasilan provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di 12 Kabupaten di Sumatera Barat masih tidak merata dan sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggi. Untuk itu perlu dicari faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat bahwa jumlah penduduk Sumatera barat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 4.865 ribu jiwa dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.321 ribu jiwa.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan di Sumatera Barat selama ini telah dilakukan melalui upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tujuan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja dengan memperhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen Internasional di bidang pendidikan. Akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dapat dilihat dari angka Harapan Lama Sekolah

(HLS). Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2017 HLS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 HLS Sumatera Barat menunjukkan angka sebesar 13,48 tahun dan pada tahun 2017 HLS Provinsi Sumatera Barat meningkat menjadi sebesar 13,94 tahun.

Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Sumatera Barat tergolong masih tinggi, dimana masih dalam kisaran diatas 5 persen. Tingkat pengangguran di Sumatera Barat tidak stabil, mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran sebesar 6,5 persen, kemudian naik menjadi 6,89 persen di tahun 2015. Peningkatan tingkat pengangguran terjadi secara beruntun dari tahun 2016 dan tahun 2017, dari 5,09 di tahun 2016 menjadi 5,58 di tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2010-2017 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya masih diatas 5 persen dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota menjadi penyebabnya, padahal dampak dari kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian.

Dari uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Barat.
2. Menjelaskan pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjelaskan pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.



1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran di Sumatera Barat.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai kemiskinan.
3. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut mengenai kemiskinan.
4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
5. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi waktu penelitian (*times series*) yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan daerah penelitian yaitu Provinsi Sumatera Barat. Variabel bebas yang diteliti adalah jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran. Sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang terkait dengan jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis serta sumber data, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH DAN PERKEMBANGAN VARIABEL PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan untuk penelitian ini.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab V, selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingan.

